



PENDIDIKAN *LIFE SKILLS* DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI PESANTREN PASCA UU NOMOR 18 TAHUN 2019

LIFE SKILLS EDUCATION AND ECONOMIC EMPOWERMENT AT POST LAW NUMBER 18 OF 2019

Mohsen¹, M. Murtdlo^{2*}, Husen Hasan Basri²

¹Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang Kementerian Agama

²Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

email: tadho25@gmail.com

Naskah Diterima: 10 November 2022; Direvisi: 6 Desember 2022; Disetujui: 21 Desember 2022

Abstract

Law on Pesantren Republic of Indonesia Number 18 of 2019 mandates that pesantrens have additional functions, one of which is the function of social empowerment. The problem arises how the readiness of pesantren with social empowerment functions to face the demographic bomb in Indonesia in 2030. This research objectives the question of how vocational education and economic empowerment efforts in pesantren are after the law. The research was conducted using a qualitative approach which was strengthened by quantitative data. The results of the research show that the potential of pesantren as a community power potential is quite large. It's just that unfortunately the collaborative work of fellow pesantren is still minimal. This has resulted in many pesantren facing this free market alone. This study recommends that the world of pesantren needs to expand models of cooperation and collaboration among pesantrens and with other institutions.

Keywords: *Economic ecosystem; Islamic boarding school law; Vocational education*

Abstrak

UU Pesantren Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 mengamanatkan lembaga pesantren mempunyai tambahan fungsi, salah satunya fungsi pemberdaya sosial. Permasalahan muncul bagaimana kesiapan pesantren dengan fungsi pemberdaya sosial menghadapi bom demografi di Indonesia 2030. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana pendidikan vokasi dan usaha pemberdayaan ekonomi di lembaga pesantren pasca undang-undang tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikuatkan dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pesantren sebagai potensi kekuatan komunitas cukup besar. Hanya saja sayangnya kerja kolaborasi sesama pesantren masih minim. Hal ini berakibat banyak pesantren menghadapi pasar bebas ini secara sendirian. Kajian ini merekomendasikan dunia pesantren perlu memperluas model kerjasama dan kolaborasi baik dengan sesama pesantren, maupun dengan lembaga lainnya.

Kata kunci: Ekosistem ekonomi; Pendidikan vokasi; UU Pesantren

PENDAHULUAN

Menghadapi Bom Demografi 2030, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan anak bangsa dengan ketrampilan vokasi tertentu untuk menghadapi puncak bom demografi tersebut. Karena saat itu jumlah manusia usia produktif sedang dalam puncaknya, sehingga minimnya vokasi akan mengakibatkan generasi muda tersisih dari persaingan pasar yang terjadi. Menghadapi kelebihan manusia usia produktif, semua lembaga pendidikan hendaknya membekali ketrampilan hidup (*life skills*) kepada peserta didiknya sedemikian rupa agar tantangan bom demografi itu akan mempunyai manfaat dan bukan malah menjadi musibah atau malapetaka. Kelebihan usia produktif dengan skills yang kurang (*less skills*) akan menyebabkan angka pengangguran meningkat di kalangan generasi muda. Tidak ada jalan lain, untuk meningkatkan kesiapan, ketrampilan dan daya saing usia produktif lembaga pendidikan menaruh perhatian yang tinggi terhadap kompetensi lulusan lembaganya. Tidak terkecuali potensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis seperti pesantren, masjid, mushola perlu memberikan perhatian terhadap kesiapan golongan muda dari jamaahnya (Murtadlo, 2019).

Pesantren sering dianggap lamban dalam merespon modernisasi yang digagas negara (Muchlis, 2018). Namun pesantren juga, sejarah kehadirannya sering menjadi penyelamat bangsa. Resolusi Jihad 1945 yang dikeluarkan para kyai pesantren telah menyelamatkan muka bangsa di tengah diplomasi internasional menegakkan kemerdekaan Indonesia (Sholikhah & Mumtahanah, 2021). Dalam konteks kontestasi ekonomi global, hadirnya komunitas ekonomi pesantren yang mandiri akan menjadi modal sosial dan inspirasi umat agar ekonomi masyarakat lokal tidak kalah dan tergeser oleh pemain global. Pesantren dengan masyarakatnya mempunyai peluang untuk mewujudkan hal tersebut (Jamaluddin, 2012).

Hari ini kehadiran pesantren yang mandiri dalam arti ekonomi sudah menjadi panggilan sejarah. Ketika investasi asing semakin membanjiri Indonesia, sementara kolektivitas masyarakat lebih banyak menjadi konsumen, maka itu akan menjadi gejala yang mengkhawatirkan. Hadirnya minimarket seperti

Alfa Mart dan Indomart yang notabene pemilik modal besar di sudut-sudut pedesaan menjadi bukti semakin tidak berdayanya kekuatan ekonomi kolektif lokal (Mukaddis & Parakkasi, 2017).

Pesantren selama ini lebih menekankan di bidang pendidikan (*tafaquh fiddin*), melihat tantangan ke depan perlu memperkaya vokasi kepada peserta didiknya. lama berperan dalam layanan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan *rekognisi, afirmasi* dan fasilitasi yang diberikan pemerintah pada pesantren. Undang-undang tentang pesantren diharapkan dapat memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada aspek-aspek seperti pengakuan (*rekognisi*) atas: independensi penyelenggaraan pesantren, varian kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, pemenuhan unsur pesantren (*arkanul ma'had*) dan ruh pesantren (*ruhul ma'had*) sebagai syarat pendirian, dan pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional (Ghofarrozin & Janah, 2021).

Selain itu, undang-undang ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren. Sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan, dari sisi fasilitasi, UU ini juga dapat menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengembangan pesantren.

Beberapa permasalahan yang sering menghantui keberhasilan pengembangan usaha ekonomi di pesantren: 1) usaha ekonomi di pesantren sering dianggap mengganggu konsentrasi pesantren sebagai lembaga tafaquh fiddin (fungsi pendidikan); 2) siapa pelaku utama yang seharusnya melaksanakan aktifitas ekonomi di pesantren: kyai atau orang tertentu yang ditunjuk. Ketidakjelasan pembagian peran membuat usaha ekonomi pesantren tidak berjalan; 3) *mindset* membangun kemandirian

ekonomi di lingkungan santri masih lemah baik secara konsep maupun *spirit*; 4) bantuan usaha ekonomi dari pemerintah sering dianggap hibah gratis, sehingga seandainya modal yang diberikan habis dikonsumsi bukanlah sebuah kesalahan; dan 5) kebingungan dalam mencari pasar untuk menjual komoditas ekonominya (Murtadlo, 2021b).

Pendapat lain seperti Silvana dan Lubis (2021) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kemandirian ekonomi pesantren, berdasarkan kajian pada pesantren Al Ittifaq Bandung Selatan terdiri dari empat aspek, yaitu aspek kelembagaan, produksi, stakeholder, dan pasar. Aspek pasar memiliki pengaruh paling besar terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Penulis ini juga menyampaikan bahwa empat faktor yang paling berpengaruh adalah kepemimpinan kiai dan pengurus, sistem informasi produksi, permodalan, dan ketersediaan pasar.

Menjawab usaha akselerasi fungsi pesantren sebagai pemberdaya sosial ekonomi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam melakukan kegiatan pemetaan pondok pesantren. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan pondok pesantren dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus merancang usaha pemberdayaan pesantren di masa yang akan datang. Dengan penelitian ini dihasilkan data “*base line*” sekaligus mencakup apa yang harus dikembangkan dan bagaimana pengembangannya, termasuk penilaian kebutuhan (*need assesment*) pesantren.

Permasalahan kajian dirumuskan: bagaimana terobosan yang bisa dilakukan untuk mempercepat penciptaan kultur usaha ekonomi di lingkungan pesantren. Permasalahan ini dirinci dengan beberapa pertanyaan turunan: 1) bagaimana pendidikan *life skills* dikembangkan di lingkungan pesantren; 2) bagaimana potensi ekonomi pesantren; 3) permasalahan apa saja yang dihadapi pesantren dalam mengembangkan usaha ekonomi; 4) bagaimana sebaiknya ekonomi pesantren dikembangkan.

Nilai penting kajian ini adalah mengingat komunitas pesantren merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai potensi besar untuk penguatan ekonomi kerakyatan di tanah air. Komunitas pesantren melibatkan banyak pihak seperti kyai, santri, para guru, orang tua santri dan masyarakat sekitar pesantren. Kalau masing-masing pesantren mempunyai sistem ekosistem ekonomi yang mandiri, maka itu akan berimplikasi luas, yaitu keberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif. Keberadaan pesantren diharapkan dapat menjadi pemicu (*trigger*) terbentuknya ekosistem itu.

KAJIAN TEORI

Kajian-kajian mengenai pesantren hubungannya dengan ekonomi di Indonesia dapat dikelompokkan paling tidak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kajian berikut: pertama, usaha-usaha pemberdayaan ekonomi dengan pesantren sebagai obyek utamanya (Nadzir, 2015; Rimbawan, 2012); kedua, peran pesantren dalam pemberdayaan sosial/masyarakat (Fathoni & Rohim, 2019; Fauroni, 2011; Muttaqin, 2016; Ryandono, 2018); ketiga, faktor-faktor penting yang berpengaruh atau potensial untuk dalam penguatan ekonomi pesantren (Anshari, 2016; Hamzah *et al.*, 2022; Mustaan, 2020). Dari tiga kecenderungan tersebut, tulisan ini berpartisipasi dalam kelompok pertama, yaitu usaha mencari jalan alternatif untuk pemberdayaan ekonomi pesantren.

Kehadiran UU Pesantren No.18/2019 menjadi indikator meningkatnya keberpihakan negara terhadap pesantren dengan perluasan akses pesantren. Mengenai akses dan peran pesantren yang termaktub dalam undang-undang tersebut paling tidak meliputi menurut Ghofarrozin bisa dimaknai: (1) memberikan pengakuan (rekognisi), afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya; (2) lulusan pesantren dapat melanjutkan jenjang perguruan tinggi berbagai jurusan, dan mudah akses kerja seperti yang lain; (3) memberikan peran yang lebih besar kepada pesantren dalam pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua; upaya penguatan kualitas santri. Penguatan kualitas santri yang dimaksud di sini adalah penguatan dalam arti pengakuan tradisi akademik

pesantren. Ketiga; menjaga kekhasan, bukan penyeragaman. Undang-undang ini tidak meredupkan nilai dan keunggulan khas pesantren. UU No. 18/2019 tidak menjadi pintu masuk untuk formalisasi dan penyeragaman pesantren. Keempat; menjag independensi, bukan intervensi. UU No. 18/2019 tidak melemahkan watak independen pesantren, tidak boleh mengintervensi pesantren, termasuk manajemen dan tata kelola keuangan pesantren. Kelima; menjaga komitmen kebangsaan. UU No.18/2019 mencegah penyalahgunaan pesantren untuk indoktrinasi terorisme, pengembangan intoleransi, dan penolakan konsensus kebangsaan atas nama agama.

Salah satu usaha mengembangkan potensi umat adalah meningkatkan kecakapan vokasional atau *life skills* warga pesantren. Memperjelas definisi kecakapan vokasional adalah salah satu bentuk kecakapan spesifik yang mengarah pada kemampuan individu dalam bekerja atau mewujudkan suatu karya. Menurut Dinas Pendidikan (2011), kecakapan vokasional disebut juga kecakapan kejuruan, yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan ini lebih cocok untuk individu yang akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor.

Tujuan pendidikan vokasi, menurut Slamet PH, mencakup empat dimensi utama, yaitu: (1) mengembangkan kualitas dasar manusia yang meliputi kualitas daya pikir, daya qolbu, daya fisik; (2) mengembangkan kualitas instrumental/kualitas fungsional, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga; (3) memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia; dan (4) menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia (Slamet, 2010).

Penggunaan kata kecakapan vokasional dalam konteks pemberdayaan berbasis pesantren dipandang kurang pas. Kecakapan vokasional mengecilkkan peran pesantren menjadi sekedar penyedia tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan industri. Untuk itu, ada pendapat bahwa dalam konteks pesantren lebih pas menggunakan terminologi pengembangan keterampilan hidup (*life skills*). Penulis di sini sepakat dengan penggunaan kata ketrampilan

hidup. Kata keterampilan hidup dapat diartikan sebagai suatu keberanian menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya (Depdiknas, 2002).

Salah satu model pengembangan kecakapan hidup adalah model 4-H yaitu pengembangan otak (head), tangan (hand), hati (heart), dan kesehatan (health). Model kecakapan hidup ini dikembangkan pertama kali oleh Universitas Ohio, Amerika Serikat. Pada dasarnya, model ini dikembangkan atas dasar pemahaman bahwa manusia dalam rangka mengatasi permasalahan hidup, dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan tercapai apabila salah satu atau semuanya di antara kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan mengelola jiwa/hati, dan kualitas kesehatan tidak dalam kondisi yang diharapkan. Berdasarkan kajian di Entoh Tohani Kulonprogo, Pengembangan Kecakapan Hidup 4-H ini dipandang sebagai suatu upaya atau mekanisme yang efektif dan bermanfaat untuk pengembangan berbagai kecakapan-kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh individu atau masyarakat sehingga dirinya dapat mengatasi berbagai masalah hidup yang dihadapi terutama dapat melepaskan diri dari kondisi kemiskinan (Tohani, 2011).

Pemberdayaan ekonomi. Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan (Sumodiningrat, 1999).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (Kurniawati *et al.*, 2013). Partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai

isu pertama pembangunan saat ini (Nugroho, 2007). Selain itu, menurut Kurniawati *et al.* (2013) usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pesantren. Lembaga pendidikan pesantren menjadi konteks dari kajian ini. Dhofier (1994) menggambarkan definisi pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pendidikan pesantren didukung keberadaan 5 unsur pesantren, yaitu kyai, santri, pondokkan, tempat ibadah dan kitab kuning.

Lembaga pendidikan pesantren hari ini telah mengalami diversifikasi dalam segala bentuknya. Bruinessen (2012) mengelompokkan pesantren menjadi: 1) pesantren paling sederhana yang hanya mengajarkan cara membaca huruf arab dan menghafal beberapa bagian atau seluruh al-Qur'an; 2) pesantren sedang yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu aqidah, tata bahasa arab, terkadang amalan sufi; dan 3) pesantren paling maju yang mengajarkan kitab-kitab fiqh, aqidah dan tasawuf yang lebih mendalam dan beberapa mata pelajaran tradisional lainnya.

Diversifikasi yang lain, pesantren pada awalnya adalah pesantren model salaf, artinya pendidikan yang berlangsung lebih menekankan pada aspek *tafaqquh fii ad diin*; diikuti model pesantren khalaf, yaitu pendidikan modern namun tetap dengan berpedoman pada prinsip *al-muhafadhotuu'ala al-qodimi al-sholihu wa al-akhdzuubil jadidi al-ashlah*; gabungan salaf dan khalaf, yaitu pesantren yang menggabungkan model salaf dan khalaf, atau mengintegrasikan tiga aspek, yaitu integrasi materi pembelajaran, integrasi metode pembelajaran, dan integrasi ijazah Pendidikan pondok pesantren dan pendidikan formal (Kholisha *et al.*, 2022); Belakangan muncul pula model pesantren yang salafi cenderung mengarah pada pemahaman Islam yang murni

(puritan) dan pendekatan terkesan normatif (Murtadlo, 2017; Nashihin, 2018).

Kajian ingin menjangkau semua jenis pesantren di Indonesia, khususnya yang sudah terdaftar di data Emis Kementerian Agama RI. Selanjutnya kerangka pikir penelitian ini disusun untuk membaca: 1) deskripsi tipologi pesantren; 2) Pendidikan *Life Skills* di pesantren; 3) Daya dukung ekonomi pesantren, dan 4) Gagasan terobosan penguatan ekonomi pesantren.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikuatkan dengan data kuantitatif. Data yang terkumpul dideskripsikan kecenderungan dominan dan kemudian diberikan penjelasan secara kualitatif. Sumber data adalah jawaban informan yang mewakili satuan lembaga pesantren, di mana informan itu bisa jadi pemimpin pesantren, kyai, pengurus pesantren, santri senior atau tenaga administrasi pesantren. Jawaban informan pesantren dijadikan data primer, sedangkan informasi-informasi terkait dari berbagai sumber mengenai pengembangan vokasi dan pengembangan ekonomi di pesantren dari berbagai sumber menjadi data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara penyebaran kuisiner melalui *survey monkey (e-instrumen)*

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah mendiskusikan secara bersama-sama antara Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tentang data apa yang dibaselinakan. Tahap kedua penyusunan instrumen dengan fokus kepada pendidikan, dakwah dan pemberdayaan dan penyiapan e-instrumen dalam aplikasi survey-monkey. Tahap ketiga melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada Kepala seksi PD & Pontren/Pakis/Pendis yang dibantu oleh para Kepala bidang PD & Pontren/Pakis/Pendis. Tahap keempat pengumpulan data dengan *google form* yang didistribusikan mulai 15 Desember 2020. Tahap Kelima pengolahan dan penyajian data.

Instrumen untuk pemetaan pesantren ini dikemas dalam *e-instrumen*, sehingga instrumen bisa dikomunikasi dengan jarak jauh. Pemetaan

ekonomi pesantren melalui aplikasi digital ini dihantui bayangan yang tidak mudah. Sebagian besar kyai, jangankan mengisi instrumen yang online, mengisi instrumen yang biasa saja respon pesantren sering lambat. Instrumen disebar, dikasih waktu untuk mengisi satu minggu, begitu diambil akhir minggu ternyata instrumen tetap saja masih kosong.

Menurut data Kementerian Agama tahun 2021, jumlah kelembagaan pesantren sudah mencapai 28.518 lembaga (Emis Kemenag RI, 2021). Berdasarkan jumlah yang berhasil terjaring *e-instrumen* kajian ini meliputi informan mewakili lembaga sebanyak 7.680 pesantren. Setelah melalui proses cleaning data dikarenakan berbagai hal seperti pengisian dobel, jumlah informan yang bisa dipakai sebanyak 6.620 pesantren (23,2%) dari populasi pesantren.

Responden tersebar ke-22 provinsi di Indonesia. Ada 5 Provinsi yang informannya terjaring lebih dari 50% dari populasi, yaitu: Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sumatera Barat adalah provinsi-provinsi yang pesantrennya terjaring lebih dari 50% target populasi untuk masing-masing wilayah provinsi. Selebihnya, provinsi-provinsi yang pesantrennya terjaring di bawah 50% target populasi, seperti Jawa Tengah 35,8%, Aceh

31,7%, Jawa Timur 20,8%, Banten 11,9% dan Jawa Barat 10,8%. Sebanyak 12 provinsi sama sekali tidak mengisi kuesioner. Jika asumsi pesantren tahun 2020/2021 berjumlah 28.518, maka hanya 23,2% yang berhasil dipetakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Tipologi Fungsi Pesantren

Undang undang Pesantren No 18 tahun 2019 menyebutkan bahwa pesantren mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan sosial, dan fungsi dakwah. Setelah diundangkannya UU tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai tugas berat untuk menggerakkan dunia pesantren dalam tiga fungsinya itu. Sejauh ini, lembaga pesantren lebih dominan menjalankan fungsi pendidikan sebagai implementasi fungsi tafaquh fiddin. Penambahan dua fungsi yang lain merupakan perluasan mandat (*wider mandate*) yang merupakan aspirasi politik pesantren untuk mendapatkan status hukum dalam Undang-Undang NKRI. Tanpa dua fungsi yang lain, tak ubahnya pesantren hanyalah pelaksana kebijakan pendidikan dan sudah mempunyai payung hukum UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

Tabel 1. Matrik Konfigurasi Layanan Pendidikan Pesantren dari Responden 3.364 Pesantren

| Jenis Layanan Pendidikan Pesantren | Responden | Prosentase |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Pendidikan Keagamaan | | |
| Pengajaran al Qur'an | 3.364 | 100,00 |
| Majlis Taklim | 3.364 | 100,00 |
| Kitab Kuning | 3.084 | 91,68 |
| Pendidikan Formal Kemenag | | |
| Roudhotul Athfal | 1.118 | 33,23 |
| Madrasah Ibtidaiyah | 1.109 | 32,97 |
| Madrasah Tsanawiyah | 2.093 | 62,22 |
| Madrasah Aliyah | 1.719 | 51,10 |
| Pendidikan Formal Kemendikbud | | |
| Taman Kanak-kanak | 920 | 27,35 |
| SD | 375 | 11,15 |
| SMP | 1.196 | 35,55 |
| SMA | 543 | 16,14 |
| SMK | 657 | 19,53 |
| Pendidikan Tinggi | | |
| Perguruan Tinggi Islam | 120 | 3,57 |
| Perguruan Tinggi Umum | 52 | 1,55 |
| Ma'had Aly | 157 | 4,67 |

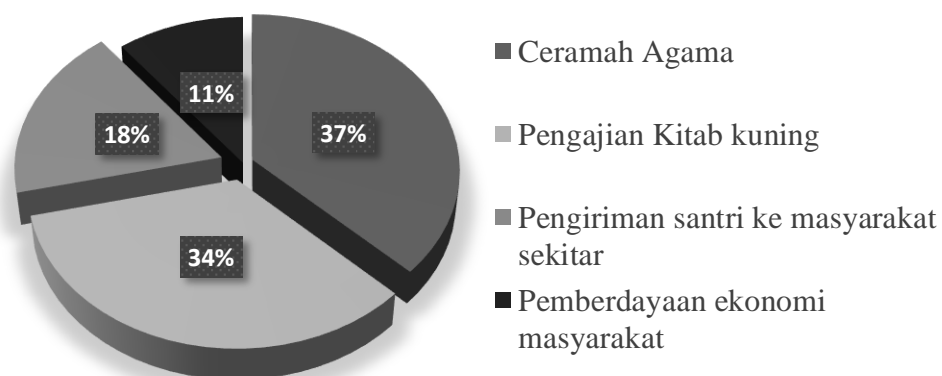
Kementerian Agama segera menyusun regulasi yang menjadi turunan dari UU tersebut. Akhir 2020, ada tiga regulasi yang terbit, yaitu: Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, KMA No. 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren; dan KMA No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly. Masing-masing merupakan edisi penyesuaian dari nomenklatur lama ke nomenklatur baru. Hanya saja ketiga KMA itu masih di ranah fungsi pendirian lembaga pesantren dan layanan pendidikan. Sementara dua fungsi yang lain belum banyak disinggung dan masih membutuhkan kehadiran KMA baru untuk mengaturnya.

Pada fungsi pendidikan, dari pesantren yang terjaring dalam survei ini, data menunjukkan jenis layanan pendidikan keagamaan yang paling banyak diberikan pesantren adalah jenis layanan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang disuarakan 3.406 pesantren; jenis layanan majlis taklim sebanyak 3364 pesantren; khusus kitab kuning 3.084; madrasah Diniyah takmiliyah awaliyah sebanyak 2.318 pesantren.

Pesantren yang memberikan layanan pendidikan formal ada yang dibawah

pembinaan kemenag ada juga yang di bawah kemendikbud dan ada yang dua-duanya. Layanan pendidikan dibawah Kemenag untuk jenjang MI (32,97%), MTs (62,22%), MA (51,10%). Pesantren yang memberikan layanan pendidikan formal di bawah binaan Kementerian Pendidikan yang terdiri SD (11,15%), SMP (35,55%), SMA (16,14%) dan SMK (19,53%). Pesantren yang menyelenggarakan perguruan Tinggi terdapat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (3,57%), Perguruan Tinggi Umum (1,55%) dan Ma'had Aly (4,67%).

Pada fungsi dakwah, ada beberapa jenis dakwah yang dilakukan pesantren. Pesantren sejak awal berdiri dan perkembangan tidak lepas dari fungsinya sebagai lembaga dakwah. Tidak heran kalau pesantren merupakan lembaga islamisasi di Indonesia selain lembaga tasawuf. Hasil pemetaan seperti terlihat dalam Gambar1 menunjukkan bahwa sebanyak 37% pesantren melakukan kegiatan dakwah dalam bentuk ceramah agama dan 34% pengajian kitab kuning. Pengiriman santri ke masyarakat sekitar (18%) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi dua bentuk kegiatan dakwah yang dilakukan pesantren (11%).

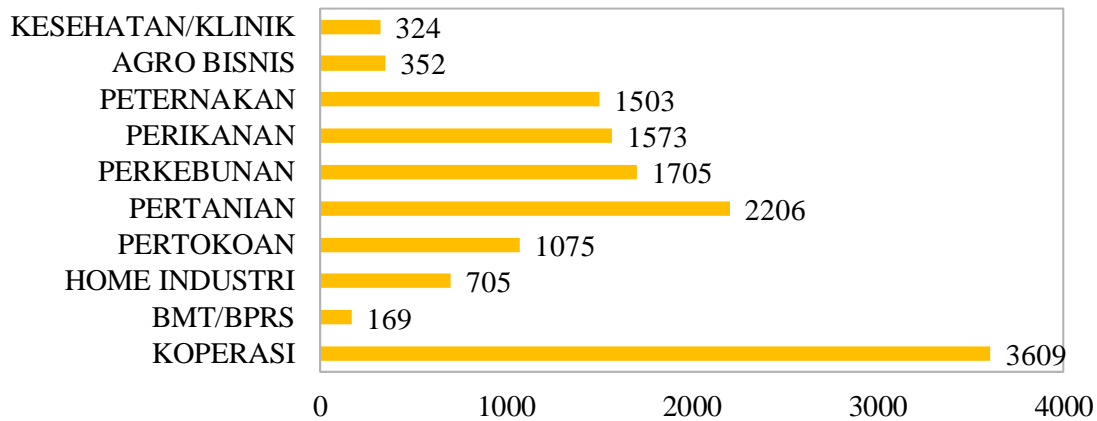


Gambar 1. Bentuk Kegiatan Dakwah kepada Masyarakat

Dilihat dari fungsi pemberdaya sosial ekonomi, jenis usaha ekonomi yang banyak dikembangkan di pesantren, survei ini menunjukkan ada 10 jenis usaha. Jumlah usaha paling banyak adalah koperasi, disusul berturut-turut kemudian usaha di bidang pertanian (beras), usaha di bidang perkebunan (kopi,

cingkeh, kelapa, buah-buahan), usaha di bidang perikanan (ternak lele, ikan), usaha di bidang peternakan (sapi, kambing, ayam), pertokoan (toko kelontong), home industri (air aqua), agro bisnis, kesehatan/klinik dan lembaga mikro keuangan seperti BMT/BPRS.

Data survei juga menunjukkan bahwa masing-masing pesantren bisa jadi tidak hanya menjalankan satu jenis usaha, namun beberapa jenis usaha sekaligus. Gambar 2 menunjukkan ada 133 pesantren mengembangkan 2 jenis usaha dan 15 pesantren mengembangkan 9 jenis usaha. Bahkan seperti terlihat dalam grafik 2,



Gambar 2. Usaha yang dikembangkan Pesantren

Pendidikan *Life Skills* di Pesantren

Untuk memetakan jenis *life skills* apa saja yang bisa dikembangkan di pesantren, kita bisa melihat jenis-jenis kompetensi yang menjadi target para penyelenggara pesantren. Ada beberapa jenis kompetensi yang ditarget kebanyakan lembaga pendidikan pesantren. Jenis kompetensi itu meliputi tiga karakter utama, yaitu: kepripadian santri soleh, penguasaan kitab/baca kitab kuning, dan ketrampilan praktis (bahasa, memanfaatkan teknologi dan ketrampilan praktis seperti pertanian, peternakan, perkebunan dan lainnya). Dari variasi gabungan karakter utama itu, penelitian Murtadlo melahirkan 4 tipe, yaitu: pertama, santri yang berhasil menguasai tiga karakter utama yaitu soleh, menguasai kitab dan punya ketrampilan praktis; kedua, pesantren yang menekankan dua karakter, yaitu kesolehan dan penguasaan kitab/baca kitab kuning; ketiga, pesantren yang menghasilkan soleh dan penguasaan ketrampilan praktis; keempat, pesantren yang berorientasi sebatas kesolehan anak (Murtadho, 2010). Dalam bahasan ini kita batasi pada pengembangan ketrampilan praktis (baca: vokasi) saja.

Terkait dengan pendidikan vokasi dari data layanan pendidikan yang dilakukan di pesantren, terdapat data yang menarik terkait pengembangan pendidikan vokasi di pesantren dilakukan dengan salah satunya pesantren

ada 10 pesantren yang mengembangkan seluruh jenis usaha, dalam artian mengembangkan (10) usaha: koperasi, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertokoan, home industri, agro bisnis, kesehatan/klinik, dan BMT/BPRS.

membuka layanan pendidikan vokasi atau SMK di pesantren. Data menunjukkan ada sebanyak 19,53% pesantren dari responden pesantren yang membuka layanan pendidikan kejuruan. Prosentase ini lebih tinggi daripada prosentase pesantren yang membukan layanan SMA umum yang hanya 16,14%. Dari responden 3364 pesantren, terdapat 657 pesantren yang membuka pendidikan kejuruan ini.

Dalam mengembangkan vokasi di pesantren, apakah sudah ada kerjasama antara Pesantren dengan SMK/MAK/Perguruan Tinggi dalam hal pengembangan vokasi santri dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Data survei ini menunjukkan sebanyak 764 (11,36%) pesantren menyatakan sudah ada kerjasama dengan SMK atau pendidikan tinggi; namun sebagian besar 5961 (88,78%) pesantren menyatakan belum ada atau tidak menjawab pertanyaan adakah kerjasama dengan SMK atau pendidikan tinggi.

Tulisan Kholilur Rahman menyebutkan bahwa ada empat keunggulan SMK berada di bawah pesantren; pertama, keunggulan melakukan komunikasi terhadap masyarakat dan pemerintah. Kedua, kiai bisa memberikan pandangan terkait standar guru yang akan direkrut; misalnya, mereka harus memiliki latar kepesantrenan dan organisasi Nahdlatul Ulama', terkecuali pada posisi tertentu di mana SDM pesantren dan NU tidak bisa

menempati posisi tersebut. Ketiga, beragamnya jejaring para kiai dalam kehidupan social; mulai dari pengusaha, politik, dan pengelola lembaga pendidikan. Keempat, modal social sebagai kepercayaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, 2018).

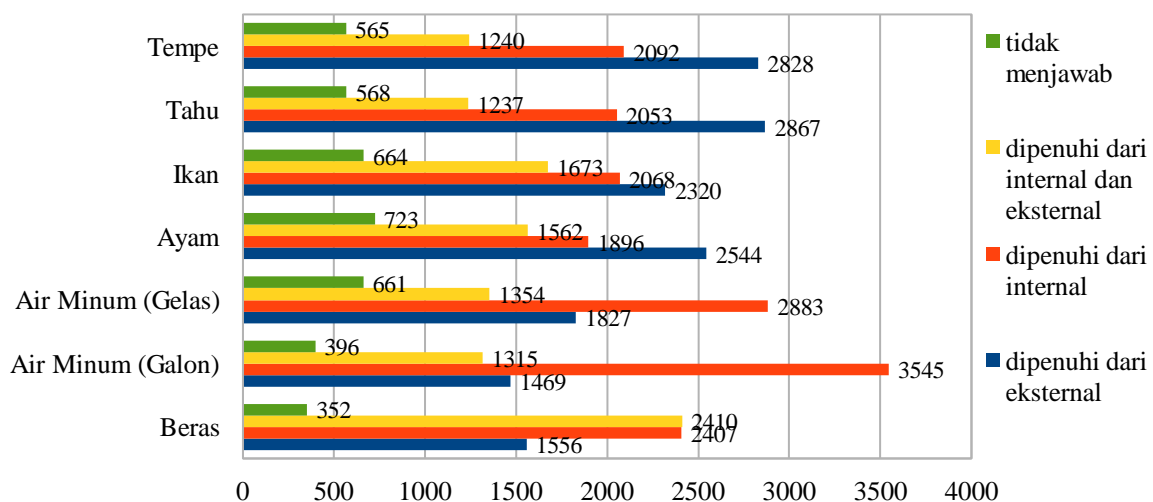
Apakah pendidikan vokasi di pesantren telah dianggap berhasil? Dalam beberapa hal khususnya dalam soft skills bisa dikatakan dalam tingkat tertentu berhasil mengingat lulusan pesantren cenderung karakter yang positif seperti mandiri (Azizah & Murtdlo, 2017), santun dan solih (Murtdlo, 2015). Namun dalam ketrampilan praktis, khususnya berkaitan dengan usaha-usaha ekonomi perlu diuji lebih lanjut. Output Pendidikan vokasi sendiri dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 adalah membentuk SDM yang berkompeten dalam hal hard skill maupun soft skill. Karakteristik di era kedua revolusi tersebut meliputi digitalisasi, optimation dan kustomisasi produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, *value added services and business, automatic data exchangeand communication*, serta penggunaan teknologi informasi (Raharja, 2019).

Meminjam istilah yang dipakai Thomas Leubner, ada empat prinsip dalam

pengembangan pendidikan vokasi yang perlu dilakukan termasuk oleh pesantren, yaitu: Pertama, penguatan hubungan dan kerjasama pesantren dengan dunia industri. Kedua, kualitas pendidikan sekolah kejuruan di pesantren terjamin dengan dipatuhi dan diterapkannya standar pendidikan secara nasional sebagai acuan proses. Ketiga, tenaga pendidik di pesantren harus menguasai dan memahami konsep pedagogik kejuruan. Keempat, ketersediaan institusi penelitian yang melibatkan instansi pendidikan, pelaku industri, dan elemen masyarakat lainnya (Dewi & Hilyatin, 2020).

Potensi Ekonomi di Pesantren

Pesantren sebagai ekosistem sosial sesungguhnya mempunyai potensi ekonomi yang besar untuk ukuran sebuah komunitas. Anggota komunitas ini terdiri dari kyai, santri, ustadz, keluarga kyai dan ustadz, pengurus, dan lainnya. Mereka setiap hari mempunyai berbagai kebutuhan, baik kebutuhan untuk pemenuhan hidup maupun kebutuhan untuk proses pendidikan. Ada tiga hal potensi ekonomi pesantren terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yaitu pangan, perlengkapan hidup, dan layanan jasa.



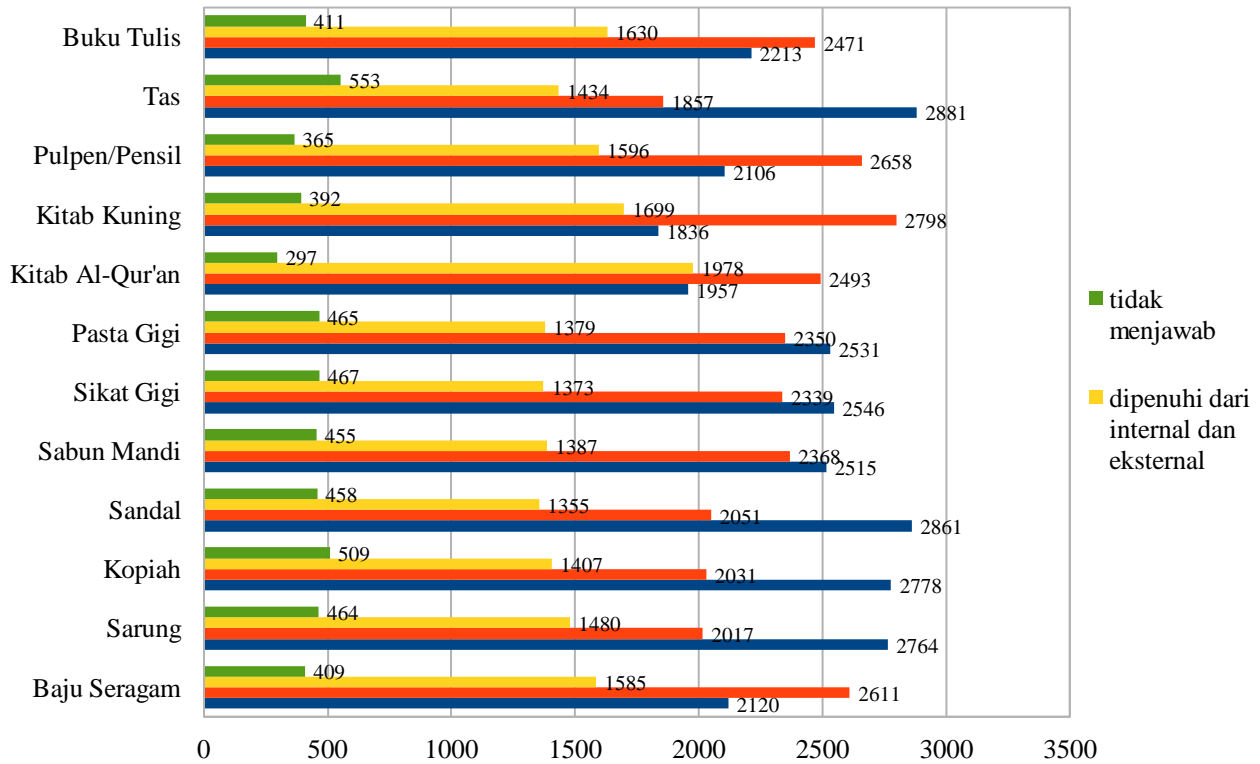
Gambar 3. Pemenuhan Kebutuhan dalam bidang Pangan

Kebutuhan pangan sehari-hari warga pesantren yang berhasil dipetakan meliputi kebutuhan beras dan lauk pauk seperti tempe, tahu, ikan, ayam, air minum (gelas), air minum (galon). Dari aspek pangan kebutuhan paling tinggi yang bisa dipenuhi oleh pihak

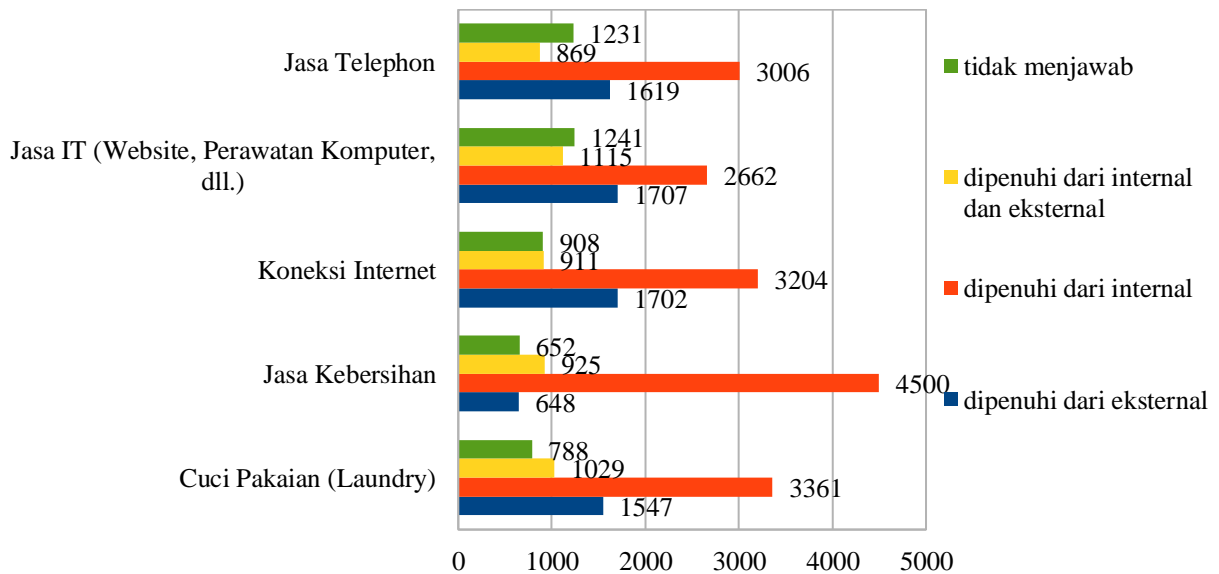
penyelenggara pondok adalah kebutuhan air minum baik dalam bentuk air galon atau air gelas. Kajian ini juga melihat bahwa banyak pesantren yang mencoba bergerak usaha di bidang pemenuhan air minum kemasan. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut sebagian

dipenuhi secara mandiri dari pengadaan internal pesantren, sebagian yang lain masih dipenuhi oleh suplier dari luar. Lauk pauk seperti tempe,

tahu, ikan, ayam dipenuhi oleh pihak eksternal pesantren.



Grafik 4. Perlengkapan Hidup dan Pemenuhannya di Pesantren



Gambar 5. Pelayanan Jasa dalam Jumlah Besar dan Pemenuhannya

Perlengkapan hidup. Di luar pangan, ada kebutuhan barang perlengkapan yang dikonsumsi sehari-hari oleh warga pesantren seperti pakaian, alat kebersihan seperti sabun, pasta gigi, sampo, dan peralatan sekolah/pendidikan. Kebutuhan perlengkapan ini dibutuhkan dalam jumlah besar. Sebagian berhasil diadakan oleh internal pesantren dan sebagian lain dipenuhi dari pihak eksternal.

Perlengkapan yang berhasil dipenuhi pihak internal pesantren seperti: buku tulis, pulpen/pensil, kitab kuning, kitab al-Qur'an, dan baju seragam. Adapun tas, pasta gigi, sikat gigi, sabun mandi, sandal, kopiah, dan sarung banyak dipenuhi eksternal pesantren.

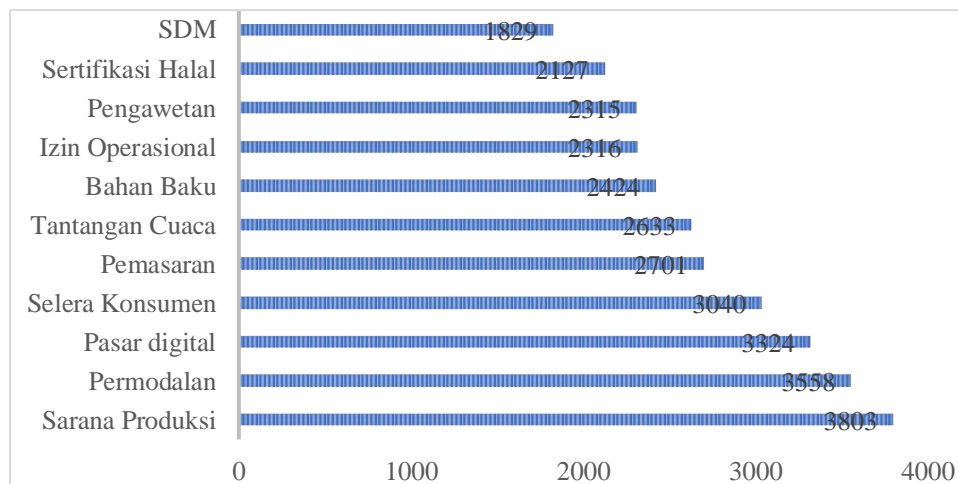
Layanan jasa. Layanan jasa yang diperlukan warga pesantren dalam jumlah besar

juga ada seperti jasa *telephone*, jasa IT, koneksi internet, jasa kebersihan, dan cuci pakaian. Layanan jasa ini sebagian dapat dipenuhi internal pesantren. Meski pelayanan jasa-jasa tersebut dipenuhi dari eksternal atau gabungan antara dipenuhi internal dan eksternal.

Daya Dukung Pengembangan Budaya Usaha di Pesantren

Selain potensi, dunia usaha ekonomi membutuhkan beberapa daya dukung budaya

usaha. Dari survei ini dapat diketahui permasalahan apa saja yang menjadi masalah dalam pengembangan usaha ekonomi di pesantren. Gambar 6 menunjukkan peringkat permasalahan tersebut. Faktor sarana produksi menjadi masalah yang paling dikeluhkan pesantren, diikuti permodalan, teknologi digital, melayani selera konsumen, pemasaran, tantangan cuaca, bahan baku, izin operasional, pengawetan barang, sertifikasi halal dan Sumber Daya Manusia.



Gambar 6. Permasalahan Utama yang dihadapi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi

Bagaimana realitas pesantren menjawab permasalahan di atas. Survey ini menunjukkan beberapa daya dukung yang tersedia di lingkungan pesantren. Dimulai dari daya dukung teknologi, daya dukung permodalan dan daya dukung kelembagaan usaha.

Dukungan Teknologi. Menghadapi era revolusi industri 4.0 dan *Society* 5.0 pengembangan usaha ekonomi di pesantren memerlukan sumber daya teknologi. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas pesantren memang miskin sarana produksi. Data lapangan menunjukkan Mesin percetakan dan mesin produksi hanya dimiliki oleh “sebagian kecil” pesantren, masing-masing 9,61% dan 6,71%.

Pada kepemilikan alat komputer menunjukkan gambaran yang lebih baik, yaitu 73,17% pesantren memiliki peralatan komputer. Data ini sekaligus menunjukkan sebaliknya masih ada 26,83% pesantren belum memiliki perangkat komputer. Keberadaan komputer di pesantren diduga masih lebih banyak mendukung fungsi pendidikan lembaga pesantren daripada berkaitan secara langsung dengan usaha ekonomi.

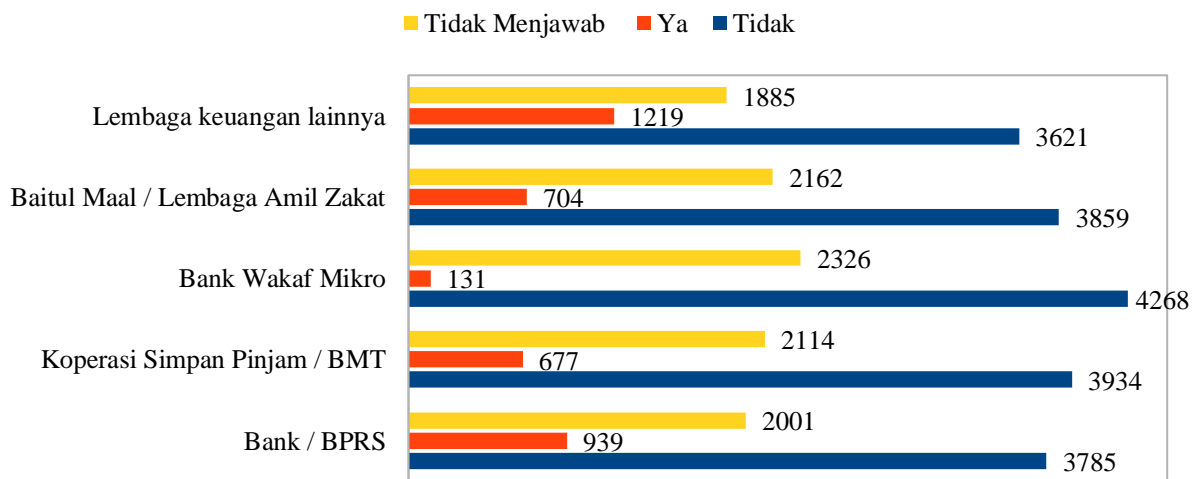
Demikian juga teknologi terkait akses internet. Belum ada separoh pesantren yang memiliki akses internet. Data lapangan menunjukkan 48,70% mempunyai akses internet; dan sebaliknya masih 51,30% pesantren belum memiliki akses internet. Masih adanya 26,83% pesantren yang belum memiliki komputer dan 51,30% pesantren yang tidak memiliki akses internet untuk hari ini sebenarnya memprihatinkan. Angka-angka tersebut hanya dari pesantren yang mengisi kuesioner pemetaan ini. Bagaimana dengan sekitar 70% pesantren yang tidak terjangkau dalam pemetaan ini tentang kepemilikan komputer dan akses internet.

Minimnya dukungan teknologi ini menjadi pemicu di lapangan ada kesan para pengelola pesantren berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana atau paket bantuan modal untuk usaha. Lembaga-lembaga pesantren berbondong-bondong mengajukan peralatan sara produksi ke pemerintah, perusahaan atau BUMN. Namun sayangnya, banyak sekali kejadian begitu pesantren menerima bantuan peralatan/sarana

produksi kebanyakan bantuan itu hanya menjadi barang inventaris saja. Kebanyakan pesantren belum mempunyai visi yang kuat untuk bergerak di dunia ekonomi. Sementara kegiatan terkait fungsionalisasi barang bantuan cenderung tidak jalan. Alasan klasik yang muncul karena tidak ada pengelola atau kesulitan menjual hasilnya (Murtadlo, 2020, 2021a).

Dukungan Lembaga Keuangan. Permasalahan kedua yang dirasakan pesantren adalah masalah permodalan. Ketika pesantren ingin memulai usaha ekonomi, masalah

permodalan menjadi masalah yang pelik. Konsentrasi layanan pendidikan menyebabkan semua sumber daya lebih diutamakan untuk melayani fungsi itu. Akibatnya perkembangan permodalan pesantren sesungguhnya memanfaatkan modal yang dimiliki di sektor pendidikan ini. Survei ini menunjukkan bahwa permodalan usaha pesantren paling banyak bersumber bukan dari lembaga keuangan yang standar seperti BPRS dan BMT. Ada kemungkinan modal usaha lebih bersumber dari sisa dana pendidikan dan dana yang dimiliki pimpinan kyai.



Gambar 7. Lembaga Keuangan yang Dimiliki Pesantren

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan belum menjadi sumber permodalan utama di pesantren. Adapun lembaga keuangan yang dimiliki lembaga pesantren ada bermacam-macam, seperti BPRS, Baitul Maal/lembaga Amil Zakat, Koperasi Simpan Pinjam atau BMT, Badan Wakaf Mikro, dan lembaga keuangan lainnya. Jumlah terbanyak sumber modal pengembangan usaha pesantren bersumber pada lembaga keuangan lain, baru di susul kemudian BPRS, Baitu Mal dan Badan Muamalah wa Tamwil (BMT).

Dukungan kelembagaan Usaha. Kelembagaan usaha di pesantren kebanyakan dibentuk dalam wadah koperasi. Lebih dari 50 % responden ternyata telah memiliki koperasi di pesantren. Data ini merupakan perkembangan baik, mengingat selama ini usaha pesantren lebih banyak didominasi usaha kyai. Dengan hadirnya koperasi di pesantren tentu memungkinkan lebih banyak warga pesantren yang dapat menerima manfaat dari usaha

ekonomi di lingkungan pesantren. Data lapangan memperlihatkan 52% pesantren memiliki koperasi pesantren dan 48% pesantren tidak memiliki koperasi pesantren.

Kelembagaan koperasi ini menjadi potensi besar yang perlu dilihat dari sisi kepemilikan dan keanggotaannya serta status koperasinya. Hasil survei ini menunjukkan keanggotaan kopontren di pesantren terbanyak oleh ustadz, disusul oleh santri, karyawan, masyarakat yang menjadi mitra usaha pesantren, masyarakat umum, dan orang tua siswa. Koperasi merupakan usaha yang sesuai dengan prinsip gotong royong, yaitu usaha yang melibatkan banyak orang.

Daya dukung kerjasama. Beberapa kementerian mulai turun gunung menanyakan apa yang bisa dibantu untuk menguatkan kemandirian pesantren. Data survei menunjukkan bahwa Kementerian/Dinas Koperasi dan UKM menempati posisi teratas sebagai kementerian dan/atau lembaga yang

sudah mitra/pembina/pendukung usaha pesantren. Selanjutnya Kementerian/Dinas Tenaga Kerja, Bank Indonesia, Kementerian/Dinas Perindustrian, dan Kementerian/Dinas Perdagangan. Data tersebut menunjukkan adanya multi kementerian yang melakukan kemitraan dengan pesantren. Tapi jika dibandingkan dengan 6.725 pesantren sasaran, hanya dibawah 20% pesantren yang terlayani oleh program kemitraan kementerian-kementerian tersebut.

Usaha Ekonomi Pesantren: Butuh Terobosan Baru

Kendala pesantren dalam mengembangkan ekonomi berdasarkan survei ini menunjukkan sarana produksi, kesulitan mendapatkan modal, teknologi publikasi/pemasaran terutama teknologi digital, mengikuti selera pasar (konsumen), keterbatasan pasar yang dikuasai, ada jalankan usaha dihadapkan kepada: kondisi sarana dan perangkat produksi yang tidak memadai; sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan; kesulitan menembus pasar digital (*e-commerce*); *skill*/pendidikan tenaga kerja; perubahan selera konsumen; dan kesulitan penjualan dan mengakses pasar yang diharapkan.

Di sisi lain, pesantren merasa tidak mengalami kesulitan dalam hal-hal seperti SDM, bahan baku, jaminan halal, pengawetan produk dan mendapatkan izin operasional. Khusus masalah SDM, pesantren memang tidak mempunyai hambatan berarti dari sisi ketersediaan SDM karena di pesantren melimpah dengan keberadaan manusianya. Menjadi masalah ketika kompetensi usaha itu ditanyakan kepada pihak pesantren. Kenapa usaha pesantren sejauh ini masih banyak yang belum hidup? .

Membahas usaha pemberdayaan ekonomi di pesantren, dalam kajian ini penulis menawarkan ada dua cara yang bisa dilakukan: pertama pengembangan vokasi atau ketrampilan insan pesantren; dan kedua, perlunya advokasi usaha pemberdayaan usaha ekonomi di pesantren. Bagaimana pendidikan vokasi di kembangkan di pesantren dan bagaimana usaha ekonomi dikembangkan di pesantren. Untuk mewujudkan kemandirian

ekonomi pesantren, sekalipun fungsi pesantren sebagai pemberdaya sosial ekonomi belum diatur lebih lanjut, namun berbagai terobosan mulai bergulir. Untungnya hari ini mulai tahun 2020 Direktorat PD Pontren memulai dengan menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Rencananya Direktorat PD Pontren akan menunjuk secara bertahap sejumlah pesantren untuk didorong untuk menjadi pesantren mandiri. Untuk lima tahun pertama, dirumuskan 100 pesantren menjadi piloting pada tahun 2021; lalu 500 pesantren (2022); serta masing-masing 1.500 pesantren pada 2023 dan 2024.

Secara kualitatif, keberhasilan praktik pesantren dalam pengembangan ekonomi dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut. Pertama, usaha ekonomi yang digerakkan oleh kyai dan ibu nyai yang memang mempunyai jiwa enterpreuner. Usaha milik kyai ini dipergunakan dalam memperlancar layanan pendidikan pesantren. Kedua, pesantren yang berhasil membentuk badan usaha ekonomi secara khusus tanpa mengganggu layanan pendidikan pesantren dan pengelolaan ekonomi yang dilakukan secara profesional. Contoh untuk ini adalah Pesantren Sidogiri Jawa Timur. Ketiga, pesantren yang berhasil membina usaha masyarakat di sekitar pesantren. Pesantren bersama masyarakat sekitar berhasil mendapatkan keuntungan ekonomi. Contohnya Pesantren Darut Tauhid, Bandung. Keempat, pesantren yang masih pada tataran coba-coba usaha dan belum berhasil keuntungan secara berkelanjutan. Kelima, pesantren yang belum bergerak di bidang ekonomi dan lebih memfokuskan diri pada layanan tafaqih fiddin dan membiarkan masyarakat sekitar yang mau dan mampu mengambil manfaat ekonomi dari keberadaan pesantren.

Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi sering menghantui keberhasilan pengembangan usaha ekonomi di pesantren: 1) usaha ekonomi di pesantren sering dianggap mengganggu konsentrasi pesantren sebagai *tafaquh fiddin*; 2) siapa pelaku utama yang melaksanakan ekonomi di pesantren: kyai atau orang tertentu yang ditunjuk. Ketidakjelasan pembagian peran yang mestinya dimainkan membuat usaha ekonomi pesantren tidak berjalan; 3) mindset membangun kemandirian ekonomi santri masih lemah, baik secara konsep

maupun spirit; 4) bantuan usaha ekonomi dari pemerintah sering dianggap hibah gratis, sehingga seandainya modal yang diberikan habis dikonsumsi bukanlah sebuah kesalahan; 5) kebingungan dalam mencari pasar untuk menjual komoditas ekonominya.

Pengembangan ekonomi pesantren butuh terobosan baru. Pengkaji mengusulkan, sudah waktunya pesantren membangun ekosistem ekonomi pesantren. Gagasan ini dibangun bersama sejumlah pesantren lain di sebuah wilayah tertentu, seperti kecamatan atau kabupaten. Pesantren-pesantren dalam jumlah tertentu itu dihimpun dalam satu asosiasi atau ekosistem. Cara kerjanya sejumlah koperasi itu menjadi produsen sekaligus pasar bagi barang-barang produksi mereka. Pemenuhan dan permintaan dikelola dalam satu sistem ekonomi. Dari pengalaman pesantren-pesantren yang mempunyai santri di atas 2.000 orang, usaha mereka bisa berjalan dan ada keseimbangan antara biaya proses produksi dan barang terserap untuk konsumsi warga santri sejumlah itu. Karena itu, pembentukan ekosistem itu bertujuan menghimpun pasar kurang lebih memenuhi minimal 2.000 konsumen tetap. Berangkat dari simpulan ini, jenis-jenis produksi bisa saling memenuhi antara pesantren satu dengan yang lain. Masing-masing pesantren mempunyai kemampuan produksi minimal satu barang.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain: 1) sosialisasi gagasan bahwa ekosistem ekonomi pesantren tidak sebatas pesantren dengan masyarakat sekitar, namun dengan sejumlah pesantren dalam kawasan tertentu; 2) melibatkan pesantren dalam jumlah tertentu, seperti 10-20 pesantren, atau pesantren satu kabupaten dalam sebuah ekosistem. 3) sesama pesantren anggota ekosistem menghitung berapa kebutuhan bulanan rutin layanan untuk santri dan pendidik terkait barang konsumsi seperti lauk pauk, sayur-mayur, sabun mandi, pasta, alat sekolah; 4) kemudian sesama pesantren saling berbagi peran pesantren mana yang bisa memenuhi kebutuhan barang tertentu. Satu komoditi bisa disediakan dua atau tiga pesantren, disesuaikan dengan kemampuan; 5) untuk pengembangan berkelanjutan, masing-masing kelompok ekosistem membuat perencanaan atau roadmap pengembangan; 6)

treatment pemerintah dan atau bantuan pemberdayaan disesuaikan dalam peta jalan (roadmap) yang disusun kelompok.

PENUTUP

Dari kajian ini menemukan kesimpulan bahwa pesantren sesungguhnya mempunyai potensi besar untuk menjadi alternatif kekuatan ekonomi di dalam masyarakat. Hanya saja potensi itu masih jauh dari kenyataan, mengingat usaha ekonomi di lingkungan pesantren cenderung berjalan masing-masing. Banyak pengelola pesantren hanya memikirkan masing-masing pesantrennya saja. Hal ini mengakibatkan pesantren itu terjebak involusi sendiri, dan tidak bisa menggalang kekuatan ekonomi antar pesantren. Hal ini mengakibatkan potensi besar pesantren belum optimal sebagai kekuatan potensial ekonomi alternatif di tengah masyarakat. Untuk itu perlu terobosan baru pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat pesantren.

Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah bentuk kerjasama-kerjasama baru yang ditempuh pengelola pesantren. Inisiatif kerjasama harus muncul dari internal pengelola pesantren. Kerjasama itu khususnya dimulai dari sesama lembaga pesantren. Pesantren dengan ekosistem sosialnya sudah merupakan pasar yang kuat untuk menghidupkan usaha ekonomi pesantren, apalagi sejumlah pesantren dalam wilayah tertentu melakukan kolaborasi untuk menyatukan kebutuhan, pemenuhan barang dan manajemen pasarnya. Selanjutnya, masing-masing pesantren warga jaringan dapat diberikan tugas untuk menyediakan produk atau komoditi tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga sosial pesantren-pesantren yang berjejaring.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut kajian ini merekomendasikan: pertama, pendidikan vokasi di masing-masing pesantren perlu diperjelas target kompetensi yang diharapkan, apalagi dalam mendukung penciptaan ekosistem ekonomi antar pesantren; kedua, bantuan sarana produksi dan permodalan pesantren sebaiknya dikonseptkan dalam satu prospektus ekosistem ekonomi antar pesantren. Hal ini diharapkan akan mengurangi angka kemubadziran bantuan sarana produksi di masing-masing pesantren yang sering menjadi

barang inventaris saja. masing-masing pesantren; Ketiga, perlu usaha semia pihak agar pengembangan usaha ekonomi antar pesantren ini dapat menjadi soko guru ekonomi komunitas dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Ekosistem pesantren mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu tulang punggung (backbone) untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di masyarakatnya masing-masing.

Terlepas dari harapan besar ekosistem pesantren menjadi pasar tetap untuk pertumbuhan ekonomi pesantren, kajian ini tidak menutup kemungkinan keterbatasan tulisan ini. Salah satu keterbatasan tulisan ini adalah pendekatan analisis ini cenderung pendekatan idealistik yang menganggap penting kerjasama kolaboratif antar pesantren. Sementara dunia pesantren cenderung berkembang dengan kekuatan perjuangan dan survival masing-masing pengelola pesantren. Harapan untuk menyatukan langkah pemberdayaan sosial pesantren terkadang yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, mereka tidak berdaya justru ketika bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Kepada para peneliti Puslitbang pendidikan Agama dan Keagamaan yang telah berperan serta dalam penjarangan data untuk kebutuhan penyusunan baseline data usaha ekonomi di lingkungan pesantren. Demikian juga terima kasih kepada civitas pesantren yang bersedia mengisi data melalui link e-instrumen. Dengan keterisian data tersebut, akhirnya peta usaha ekonomi pesantren dapat dipetakan secara cepat. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada editorial dan reviewer jurnal Edukasi yang telah bersedia menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A. (2016). Strategi rekonstruksi ekonomi pesantren masa depan. *ITTIHAD*, 14(25).
- Azizah, L. N., & Murtadlo, M. (2017). Pendidikan Karakter Kemandirian di Pesantren Roudhatul Muttaqien Kalasan Sleman. In M. Murtadlo (Ed.), *Pendidikan Karakter di Pesantren* (hal. 31–56). Baroena Daya.
- Bruinessen, M. van. (2012). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Madinah.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9–14.
- Emis Kemenag RI. (2021). *Data Pondok Pesantren*. kemenag.go.id. <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-pontren>
- Fathoni, M. A., & Rohim, A. N. (2019). Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 133–140.
- Fauroni, R. L. (2011). Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18.
- Hamzah, M., Febrianto, A., Yakin, A., Nurbayah, S., & Riyantoro, S. F. (2022). Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Digitalisasi Unit Usaha Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1040–1047.
- Jamaluddin, M. (2012). Metamorfosis pesantren di era globalisasi. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 127–139.
- Kholisha, A., Anam, M. K., & Abrori. (2022). Integrasi Model Pendidikan Pondok Pesantren Salaf dan Khalaf. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 37–55.
- Muchlis, L. (2018). *Modernisasi sistem pendidikan pesantren menurut Nurcholis Madjid*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.
- Mukaddis, M., & Parakkasi, I. (2017). Strategi Pondok Pesantren Dalam Persiapan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2), 174–186.

- Murtadho, M. (2010). Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi. *Dialog*, 30(63).
- Murtadlo, M. (2015). Solih Akrom: Paradigma Pengembangan Pendidikan Di Pesantren Kajen, Margoyoso Pati. In *Tradisi Keilmuan Pesantren*. Pustaka Cendekiamuda.
- Murtadlo, M. (2017). Reproduksi Paham Keagamaan Dan Respon Terhadap Tuduhan Radikal (Studi Kasus Pesantren Ngruki Pasca Bom Bali 2002). *Harmoni*, 16(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.62>
- Murtadlo, M. (2019). *Pendidikan Vokasi Berbasis Masjid: Ternak Sapi Jamaah Masjid Baiturahman Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5120953>
- Murtadlo, M. (2020). Gagasan Pengembangan Pendidikan Pesantren Berbasis Maritim di Banten. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*.
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.680>
- Murtadlo, M. (2021a). *Murtadlo, Muhamad. 2022. "Pengembangan Ekonomi Pesantren Butuh Terobosan Baru." OSF Preprints. November 9. osf.io/3n46e. www.kemeng.go.id.*
<https://www.kemeng.go.id/read/pengembangan-ekonomi-pesantren-butuh-terobosan-baru-5v84n>
- Murtadlo, M. (2021b). *Pengembangan Ekonomi Pesantren Butuh Terobosan Baru*. Kemeng.go.id.
<https://www.kemeng.go.id/read/pengembangan-ekonomi-pesantren-butuh-terobosan-baru-5v84n>
- Mustaan, A. G. (2020). Gaya Kepemimpinan Kiai Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 30–46.
- Muttaqin, R. (2016). Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren (studi atas peran Pondok Pesantren Al-ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap kemandirian ekonomi santri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 65–94.
- Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56.
- Nashihin, H. (2018). Praksis Internalisasi Karakter Kemandirian di Pondok Pesantren Yatim Piatu Zuhriyah Yogyakarta. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.18860/jpai.v5i1.6234>
- Nugroho, T. (2007). *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang, FIA. Universitas Brawijaya. FIA Universitas Brawijaya.
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Perguruan Tinggi Vokasi. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(1), 11–20.
- Rahman, K. (2018). Inovasi Pendidikan Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 6(2), 225–252.
- Rimbawan, Y. (2012). *Pesantren dan Ekonomi: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Munggal Krian Sidoarjo Jawa Timur*.
- Ryandono, M. N. H. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. *Mozaik Humaniora*, 18(2), 189–204.
- Sholikhah, S., & Mumtahanah, N. (2021). Kontribusi Kebangsaan Kiai Hasyim Asy'ari: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika*, 15(1).
- Silvana, M., & Lubis, D. (2021). Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). *AL-MUZARA'AH*, 9(2), 129–146.
- Slamet PH. (2010). *Kewirausahaan*.

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Ghalia Indonesia.

Tohani, E. (2011). Pendidikan Nonformal dan Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan.

Walisongo, Volume 19, Nomor 2, November 2011, 19(385–398).

Zamakhsyari Dhofier. (1994). *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.